ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NURYULIANA

NPM. 1351010220

Program Studi Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H/ 2018 M

ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NURYULIANA

NPM. 1351010220

Program Studi: Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Hanif, S.E., M.M.

Pembimbing II : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

Oleh:

NURYULIANA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh anggaran kecamatan bersumber dari APBN dan bantuan dari APBD (Provinsi dan kabupaten/kota). Setelah kedudukan kecamatan berubah menjadi wilayah kerja perangkat daerah dan Camat sebagai perangkat daerah, sumber utama anggaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berasal dari APBD kabupaten/kota. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut, maka anggaran kecamatan disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) dan anggaran berdasarkan prestasi kerja (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dan diperlakukan sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Tugas pokok dan fungsi unit kerja merupakan dasar dalam penyusunan anggaran unit kerja perangkat daerah.

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai? Serta bagaimana kinerja pegawai dalam perspektif ekonomi islam?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan Baradatu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan alat pengumpul data sebagai berikut: kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi penyusunan anggaran pada pegawai kantor Kecamatan Baradatu sangatlah sedikit. Hal ini dikarenakan anggaran sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan. Para pegawai biasanya hanya sebatas melaksanakan tugas serta memberikan laporan dan evaluasi pada satu periode untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah. Sehingga, keikutsertaan pegawai dalam menyusun anggaran hanya pada proses pelaporan dan evaluasi saja. Hal ini terlihat dari 10 responen hanya 2 orang pegawai yang sering atau selalu terlibat dalam penyusunan anggaran. Sedangkan dalam perspektif ekonomi islam kinerja pegawai di kecamatan Baradatu sudah sesuai dengan kaidah islam dan prinsip ekonomi islam yakni adanya sikap kerja keras, berusaha, bekerja halal jujur, adil, bekerjasama serta bekerja sesuai dengan koridor struktur organisasi kecamatan.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat :Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama	: **NURYULIANA**
NPM	: **1351010220**
Jurusan	: **Ekonomi Syari'ah**
Fakultas	: **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Judul Skripsi	: **Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Hanif, S.E., M.M.
NIP. 19740823 200003 1 001

Pembimbing II,

Hj. Marchiyah Hayati, S.P., M.S.I.
NIP.19760529 200801 2 010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah

Madnasir, S.E., M. Si.
NIP. 19750424 200212 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat :Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :**Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)** di susun oleh: **Nuryuliana**, NPM: **1351010220**, Jurusan: **Ekonomi Syaria'ah,** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Jum'at, 9 Februari 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua	: **Madnasir, S.E., M.Si.**	(.....)
Sekretaris	: **Ulul Azmi, M.Si.**	(.....)
Penguji I	: **Evi Ekawati, S.E., M.Si.**	(.....)
Penguji II	: **Hanif, S.E., M.M.**	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh. Bahrudin, M.A
NIP.19580824 198903 1 003

MOTTO

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya : ”Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.(QS : At Taubah : 105).[1]

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 162.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda tercinta Maznan (Alm) & ibunda tersayang Sahanah yang selalu berjuang demi cita-cita dan mimpi anaknya, yang begitu luar biasa cinta kasih dan doanya, yang takkan pernah berhenti mendukung dan memotivasi anak-anaknya.
2. Seluruh keluargaku yang selalu memberikan dukungan, Tetehku tersayang Paini Yati dan Kakak iparku Salim, serta keponakanku tersayang Tamara Putri Salim, Nabilla Nur Nida dan Sella Novia Lestari yang selalu memotivasi serta memberikan keceriaan dalam keluarga semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebahagiaan kepada kalian Amin.
3. Sahabat-sahabatku tercinta Ela Hayati, S.E., Wahyuni Andrefa, S.E., Arlita Trisdyani Putri, S.E., Yunita Elfa Rizki, S.E., Imam Rifai, Bayu Ari Santoso, S.E., Suci Wulandari, Rudiyanto, S.E., Riana Nur Hidayah, Annisya Dwi Prameswari, Lilik Widiarti, Riko Setiawan, Richad Vernando, dan teman teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas

kasih sayang, bantuan, dukungan, dan motivasi serta semangat yang kalian berikan.

4. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam jurusan Ekonomi Islam angkatan 2013, kelas A, B, C, D, E, terutam kelas F, terimakasih telah menjadi teman-teman yang baik, yang selalu memberikan warna baru setiap hari nya selama ini.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nuryuliana, dilahirkan di Setianegara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 27 Juli 1995, anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Maznan dan Ibu Sahanah. Bertempat tinggal di Desa Setianegara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

1. Penulis mengawali pendidikan di TK Harapan Setianegara Baradatu selesai pada tahun 2001
2. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar SDN 1 Setianegara selesai pada tahun 2007
3. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP N 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan selesai pada tahun 2010
4. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK YP 17 Baradatu selesai pada tahun 2013
5. Selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di mulai pada tahun 2013.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT,berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian inidengan judul **"Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)"**.Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw yangtelah menegakkan kalimat Tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yangpenuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hariakhir nanti, Amin.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Islam.

Dalam upaya untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

2. Madnasir, S.E., M.SI. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan membimbing mahasiswanya dalam pengajaran yang baik.
3. Bapak Hanif, S.E., M.M. sebagai pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan memberikan masukan-masukan serta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I. sebagai pembimbing II, yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Bapak Arie Anthony Thamrin, S.STP. M.I.P. selaku Camat Baradatu beserta jajarannya yang telah terlibat memberikan sumber data serta informasi yang akurat dan Para Pegawai Kantor Kecamatan Baradatu yang telah banyak membantu dalam informasi data tentang Penyusunan Anggaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa suatu halangan apapun.
7. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyediakan referensi buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.Semoga semua kebaikan yang telah diberikan, akan mendapat balasan kebaikan yang lebih besar disisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang pernah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, dan dapat memberikan sumbangan fikiran dalam pembangunan dunia pendidikan.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis,

Nuryuliana
1351010220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
HALAMAN RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 3
C. Latar Belakang Masalah 4
D. Rumusan Masalah 15
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 15
F. Batasan Masalah 17
G. Metode Penelitian 17

BAB IILANDASAN TEORI
A. Partisipasi Penyusunan Anggaran 23
1. Pengertian Anggaran 23
2. Karakteristik Anggaran 25
3. Manfaat Anggaran 25
4. Fungsi Anggaran 26
5. Siklus Anggaran Sektor Publik 30
6. Pendekatan Dalam Penyusunan Anggaran 32
7. Pengertian Partisipasi Penyusunan Anggaran 33
8. Manfaat Partisipasi Penyusunan Anggaran 34
9. Pengukuran Partisipasi Penyusunan Anggaran 35
10. Indikator Partisipasi Penyusunan Anggaran 36
B. Kinerja 36
1. Pengertian Kinerja 36
2. Penilaian Kinerja 37
3. Aspek-aspek Penilaian Kinerja 38

4. Aspek-aspek Standar Pekerjaan 40
C. Partisipasi Penyusunan Anggaran Dalam Perspektif Ekonomi islam 40
D. Kinerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam 43

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 50
1. Sejarah berdirinya Kecamatan Baradatu 50
2. Keadaan Geografis Kecamatan Baradatu 52
3. Kondisi Demografis Kecamatan Baradatu 54
4. Visi dan Misi Kecamatan Baradatu 56
B. Gambaran Penyusunan Anggaran Di Kantor Kecamatan Baradatu..... 56
C. Gambaran Umum Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Baradatu 60
D. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 62

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Baradatu . 65
B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Baradatu 71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 76
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA..... 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel3.1 Data Luas Wilayah Kecamatan Baradatu 53

Tabel 3.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin..... 54

Tabel 3.3 Komposisi Penduduk Menurut Agama 54

Tabel 3.4 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan 55

Tabel 3.5 Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan 60

Tabel 3.6 Distribusi Jawaban Responden 63

Tabel 4.1 Distribusi Jawaban Responden Variabel X..... 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Surat Pengajuan Proposal Skripsi

Lampiran 2.Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 3.Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Tahun Akademik 2016/2017

Lampiran 3. Blanko Konsultasi

Lampiran 4. Surat Izin PraRiset

Lampiran 5.Surat Izin Riset

Lampiran 6. Kerangka Kuesioner

Lampiran 7.Panduan Wawancara

Lampiran 8. Struktur Organisasi Kantor Camat Baradatu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Judul proposal skripsi Ini "Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pegawai Kantor Kecamatan Baradatu, Way Kanan)". Maka terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[1]
2. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang / benda) yang ikut membentuk watak , kepercayaan , atau perbuatan seseorang.[2] Adapun variable-variabel yang memengaruhi dalam penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran yang merupakan variable independent. Sedangkan kinerja pegawai merupakan variable dependent.

---

[1]M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 52.
[2]Poerwadar Minta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), h. 731.

3. Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam proses penyusunan anggaran.
4. Kinerja Pegawai merupakan hasil kerja dari seorang karyawan atau pegawai dalam menjalankan tugas.[3]
5. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseoarang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.[4]
6. Ekonomi islam mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka.[5]

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan Baradatu.

---

[3]Galih Wicaksono, "*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Sekolah Menengah Atas Di Tegal*". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6 No. 2 (Oktober 2016), h. 203.

[4]Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 249.

[5]Suharwadi, Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 36.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

   Dengan meneliti tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan Baradatu dapat diketahui apakah anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur performance setiap pegawai, serta apakah anggaran juga dapat menjadi alat untuk memotivasi kinerja anggota organisasi.

2. Alasan Subyektif

   a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dibidang Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

   b. Karena judul tersebut sesuai dengan spesialisasi keilmuwan penulis yaitu pada jurusan Ekonomi Islam serta didukung oleh tersedianya literature baik primer maupun sekunder dan data penelitian yang menunjang dalam penelitian tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi APBN agar dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistimatis.[6]

Diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan pada prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan dimaksud mengacu pada meningkatnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran daerah tersebut. Mulai dari kepala daerah hingga Satuan

[6]Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, Gede Putu Agus Susila Jana, "*Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota".Jurnal Bisnis dan Manajemen,* Vol. 3 (2015), h. 2.

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawahnya. Ini dapat diartikan sebagai meningkatnya partisipasi pegawai dari tingkatan bawah dalam proses penyusunan anggaran.

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor swasta dan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan penting yang melibatkan berbagai pihak, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dimana masing-masing pihak memainkan peran dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dan tujuan angaran. Anggaran yang dihasilkan senantiasa digunakan sebagai tolok ukur bagi kinerja manajer dan para karyawan. Oleh karenanya, penyusunan anggaran partisipatif diharapkan akan meningkatkan kinerja para manajer, dimana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi

disetujui, maka karyawan akan menginternalisasi tujuan yang ditetapkan, dan memilikirasa tanggung jawab untuk mencapainya karena mereka ikut terllibat dalam penyusunan anggaran tersebut.[7]

Proses penyusunan anggaran, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu top-down , bottom up dan partisipasi. Proses penyusunan anggaran dengan metode top-down merupakan penganggaran yang keseluruhannya disusun dan disahkan oleh pihak manajemen level atas dan pihak manajemen level bawah hanya melaksanakan anggaran yang telah disahkan. Sedangkan proses penyusunan anggaran bottom – up (*partisipatif*) merupakan penyusunan anggaran dengan memberikan kewenangan kepada pihak manajemen level bawah untuk kemudian diajukan kepihak manajer atas.

Penganggaran partisipatif (*participative budgeting*) merupakan pendekatan penganggaran yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Penyusunan anggaranpartisipatif akan memberikan motivasi kerja kepada individu yang terlibat dalamnya. Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Narmodo dan Wajdi menyebutkan bahwa motivasi pada dasarnya adalah proses yang menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk

[7]Lilis Setyowati, Purwantoro, "*Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dan Kepuasan Kerja Pada Pemerintahan Kota Semarang". Media Ekonomi dan Teknologi Informasi,* Vol. 21 No. 2 (September 2013), h. 66-67.

melaksanakan pekerjaan.Motivasi atau dorongan untuk bekerja ini sangat menetukan bagi tercapainya suatu tujuan.[8]

Di dalam penyusunan anggaran, keterlibatan berbagai komponen unit kerja di suatu instansi sangat diperlukan. Dahulu penganggaran dilakukan dengan sistem *top-down*, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan atau pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan atau pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah disusun. Dalam hal ini jika penyusunan anggaran hanya berdasarkan kehendak atasan tanpa melibatkan partisipasi bawahan maka dapat menimbulkan kesulitan bagi bawahan untuk mencapainya. Sebaliknya jika penyusunan anggaran hanya disusun sesuai kehendak bawahan maka juga dapat menimbulkan rendahnya motivasi bawahan dalam mencapai target-target optimal. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran akan sangat memungkinkan mereka memberi informasi lokal yang diketahui. Dengan cara ini, bawahan dapat mengkomunikasikan atau mengungkapkan beberapa informasi pribadi yang mungkin dapat dimasukkan dalam standar atau anggaran sebagai dasar penilaian.[9]

Partisipasi didalam penyusunan anggaran diyakini mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi karyawan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan kerjasama diantara para manajer. Maka, manusia harus dapat

---

[8]Caesar Arif Budiman, Ria Nelly Sari, Vince Ratnawati, "*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Intervening". Jurnal Sorot,* Vol. 9 No. 1 (April), h. 87.

[9]Lilis Setyowati, Purwantoro, *Op.Cit.* h. 67.

menumbuhkan motivasi kerja setingi-tingginya bagi para karyawan dalam perusahaan. Jadi dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran, kinerja pegawai akan meningkat karena komunikasi antara bawahan dengan atas dalam membuat keputusan bersama menimbulkan motivasi dalam bekerja.[10]

Agar suatu anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan dalam penyusunan anggaran. Karena proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, adanya kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi.[11]

Kelangsungan suatu organisasi itu ditentukan oleh kinerja pegawainya. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, guna evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian mengukur kinerja tidak hanya informasi finansial tetapi juga informasi nonfinansial. Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif maka perlu memperhatikan partisipasi dalam penyusunan anggaran serta adanya motivasi kerja yang tinggi dan *internal locus of control* dalam hubungan keputusan yang berkaitan dengan anggaran.

---

[10]Caesar Arif Budiman, Ria Nelly Sari, Vince Ratnawati, *Loc.Cit.*

[11]Deddi Nurdiawan, *Akuntansi Pemerintahan,* (Jakarta : Salemba Empat, 2007), h. 71.

Dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pegawai, mengingat keterlibatan manajer atau individu suatu organisasi dalam proses penyusunan anggaran tidak dapat dipisahkan dari sikap terhadap situasi kerja dan perilaku individu khususnya manajer atau pemimpin yang ditampilkan melalui sikap dan keyakinan di dalam visi mereka dalam organisasi.

Dalam sektor publik, penganggaran partisipatif belum mempunyai sistem yang baik sehingga penerapannya pun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, adanya kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Untuk mencegah dampak disfungsional anggaran tersebut, kontribusi terbesar dari kegiatan penganggaran terjadi jika semua pihak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.[12]

[12]Esha Dening Shandi, Handoko A Hasthoro, Wika H Putri, "*Kinerja Manajerial Dalam Perspektif Islam". Universitas Janabadra, Yogyakarta,* Vol. 9 No. 1 (Maret 2016), h. 140-141.

Kinerja aparat pemerintahan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu atasan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial, dimana kinerja dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang dianggarkan. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan anggaran, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.[13]

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis, penyusunan anggaran yang diajukan oleh kantor kecamatan Baradatu yaitu kegiatan yang berdasarkan Kasubbag (Kepala Sub Bagian) dan Kasi (Kepala Seksi). (1) Kasi pemerintahan, (2)Kasi sosial, (3)Kasi PMK (pemberdayaan masyarakat kampung), (4)Kasi pelayanan, dan (5)Kasi tantrip. Semua kegiatan yang diajukan dalam penyusunan anggaran berdasarakan ke-lima Kasi di atas, tetapi tidak semua Kasi berpartisipasi dalam penyusunan Anggaran. Dan hanya beberapa Kasi yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran yaitu Kasi PMK (Pemberdayaan Masyarakat Kampung), Kasi Pemerintahan dan Kasi Sosial. Sedangkan Kasi yang tidak berpartisipasi dalam penyusunan anggaran yaitu Kasi

[13]Restu Agusti, *"Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi Oleh Variabel Desentralisasi Dan Budaya Organisasi".Jurnal Ekonomi*, Vol. 20 No.3 (September 2012), h. 2.

Pelayanan dan Kasi Trantib. Karena anggaran yang terdapat di Kasi Pelayanan dan Tantrib tidak terlalu besar maka anggarannya dilimpahkan ke Kasi lainnya.

Dalam Islam pengawasan yang ber-fungsi sebagai pengendalian dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.[14] Berdasarkan ruang lingkupnya, pengawasan terbagi menjadi dua; pertama pengawasan internal (*built-in control*) yaitu, pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan bersumber dari keimanan kepada Allah SWT (tauhid). Secara filosofis, fungsi pengawasan dalam islam muncul dari pemahaman manusia akan tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan.[15] Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim tersebut akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Yang kedua pengawasan eksternal (*external control*) yaitu, pengawasan eksternal yang dilakukan dari luar diri manusia dan terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas terkait dengan anggaran dan lain-lain.

Sehingga dengan mengacu kepada kaidah ushul fiqh di atas, dapat ditegaskan bahwa pengawasan anggaran adalah wajib karena, penerapan shidq dan amanah tidak akan berjalan, tanpa adanya pengawasan, pengawasan tidak

[14]Abdul Manan, *Membangun Islam Kaffah*, (Jakarta: Madina Pustaka, 2000), h. 152.

[15]Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 180.

dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran. Oleh karena itu dalam perspektif ekonomi islam, menegaskan transparansi anggaran adalah kewajiban agama islam yang mulia. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat" (Q.S. An-Nisaa':58)

Dengan demikian penerapan transparansi anggaran akan menciptakan efisiensi terutama dalam pendanaan. Sebaliknya jika terdapat kecurangan, karena dipesan pihak tertentu untuk menaikkan angka yang tidak sesuai dengan plafonnya, maka yang terjadi bukan hanya pembengkakan dana, tetapi sangat dimungkinkan terdapat penyalahgunaan atau korupsi.

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan. sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut "*level of performance*". Biasanya orang yang *level of performance* tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapaistandart dikatakan sebagai tidak produktif atau ber *performance* rendah.[16]

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat 19:

[16]Moh As'ad, *Psikologi Industri Edisi ke Empat*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 48.

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْۖ وَلِيُوَفِّيَهُمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٩

Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan" (Q.S. Al-Ahqaaf:19)

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja pegawai aparatur pemerintah merupakan masalah yang banyak diperdebatkan, bukti empiris memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Dalam beberapa kasus pada organisasi pemerintah menunjukkan hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah, sebagai contoh Brownell (1982), Indriantoro (1993) dalam Sumarno (2005), dan Arifah (2007) dalam Septi (2010) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan Kenis (1979) dalam Sumarno (2005) menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial.

Hubungan positif dan negatif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pegawai dipengaruhi oleh kondisi dan situasi tertentu. Hal semacam ini dijelaskan dengan pendekatan kontingensi (*contingency approach*), dimana pendekatan ini memberi gagasan bahwa sifat hubungan yang ada dalam partisipasi anggaran dengan kinerja pegawai harus sesuai dengan aspek-aspek organisasi dan berbeda bagi tiap situasi. Pendekatan kontingensi mempelajari perilaku pegawai sebagai reaksi atas sejumlah keadaan tertentu guna menyarankan praktek-praktek manajemen yang dianggap paling cocok dalam rangka usaha menghadapi situasi tertentu.[17]

Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial telah banyak dilakukan, baikpada sektor pemerintahan maupun swasta. Pada penelitian ini akan dilihat seberapa besar pengaruh partisipasi penyusunan anggaran yang dilakukan oleh semua pegawai di kantor kecamatan Baradatu terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana partisipasi penyusunan anggaran di kantor kecamatan baradatu memberikan pengaruh pada kinerja pegawainya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".

[17]Gita Pramudya Saraswati, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating". (Skripsi Program Sarjana Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), h.4.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang tertulis di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai di kantor Kecamatan Baradatu?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang kinerja pegawai di kantor kecamatan Baradatu?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

   a. Untuk mengetahui partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai di kantor Kecamatan Baradatu.
   b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang kinerja pegawai di kantor Kecamatan Baradatu.

2. Manfaat Penelitian

   Dari setiap penilitan tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

   a. Secara Teoritis

      Agar dapat tambahan literature atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu Ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis : menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan manajemen yang sesuai dengan Ekonomi Islam.

2) Bagi Organisasi : diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan, sehubungan dengan partisipasi penyusunan anggaran untuk meningkatkan kinerja pegawai khususnya yang bersangkutan dengan perencanaan dan pengendalian manajemen agar lebih efektif dan efisien. Juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan menentukan perencanaan dan kebijakan dimasa yang akan datang.

3) Bagi Mahasiswa : dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja pegawai pada suatu organisasi sektor publik.

F. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan selanjutnya. Agar pembahasan masalah lebih terarah maka penulis memberikan batasan pada penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut adalah:

1. Pada penelitian ini hanya membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai.

2. Responden yang diambil tidak semua pegawai yang ada di kantor kecamatan Baradatu tetapi hanya Camat, Sekertaris Camat, Kasubbag, serta KASI.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.[18]

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pada Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.[19]

   b. Sifat Penelitian

      Penelitian yang peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana menurut M. Nazir metode deskriptif itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan menurut Suharsim Arikunto, detegaskan bahwa penelitian deskriptif

[18]Mardalis, *Suatu Pendekatan Proposal, cetakan ke X,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 28.

[19]Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.46-47.

tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang gejala atau keadaan.[20]

2. Sumber Data

Adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Ada 2 jenis sumber data yang penulis gunakan untuk penilitian ini, yaitu:[21]

a. Data Primer

Data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang akan diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari pegawai atau pimpinan yang ada di Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli, mengutip untuk memperoleh data dari berbagai referensi.[22]

3. Populasi dan Sampe

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

---

[20]Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandung: Tarsito, 1985), h. 131.
[21]Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Op.Cit*. h. 48.
[22]Mohammad Bapundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.[23] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor kecamatan baradatu. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian penyusunan anggaran di kantor kecamatan yang berjumlah 10 responden yakni Camat, Sekretaris Camat, Kasubbag, dan Kasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian populasi yaitu semua populasi dijadikan sampel atau responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Kuesioner

untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada objek yang akan dijadikan penelitian, dan juga menambah data yang diperlukan untuk penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diberikan kepada pegawai kantor kecamatan Baradatu.

b. Wawancara

Menurut Kartini Kartono interview atau wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.[24]

[23] *Ibid*, h. 147.
[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 187.

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran di kantor kecamatan Baradatu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen gambar berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya dapat berupa gambar, patung, film, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh sejarah pribadi, atau bentuk lain dari metode observasi.[25]

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang penelitian ini berupa data pegawai dan profil kantor kecamatan Baradatu.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan penelitian, data yang telah terkumpul akan dianalisis sebagaimana data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan langkah-langkah sebagaimana berikut:

[25]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 82.

a. Editing

adalah memeriksa hasil wawancara yang telah didapat dari responden.

b. Klasifikasi

adalah pengelompokan data-data sesuai dengan jenis dan peggolongannya setelah diadakan pengecekan.

c. Interpretasi

adalah memberikan penafsiran terhadap hasil presentase yang diperoleh sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.[26]

d. Analisis Data

merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil kuesioner, interview dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain.[27]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dibedakan menjadi dua macam yaitu analisis kualitatif dan analisis

[26]Moersalah, Musanef, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta : Gunung Agung, 1981), h. 17.

[27]Noer Muhadjir, *Metodologi Keilmuwan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2004), h. 79.

kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan peneliti.

Analisis ini dilakukan dengan tujuan menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah untuk dibaca atau diinterpretasikan. Data yang dikelompokkan dan diadakan kategori serta dilakukan klasifikasi sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.

Metode pengelolahan dan analisis data yang digunakan peneliti adalah anaisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk variabel dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik, dalam penelitian kualitatif, langkah penelitian baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai.[28]

[28]*Ibid*. h. 75.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Partisipasi Penyusunan Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Lebih rinci lagi, Halim mengartikan anggaran yaitu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, anggaran menduduki posisi yang penting. Proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut dengan penganggaran. Dalam sektor publik, penganggaran merupakan tahapan yang cukup rumit dan penuh dengan nuansa politik. Berbeda dengan sektor swasta atau bisnis, anggaran dianggap sebagai rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik, sedangkan pada sektor publik anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas publik di dalam mengelola dana publik dan program-program yang didanai dengan uang publik sehingga anggaran pada sektor publik justru harus diinformasikan untuk didiskusikan secara terbuka.[29]

[29]Gita Pramudya Saraswati, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating". (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), h. 16-17.

Anggaran publik merupakan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.[30]

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.[31]

Secara teoritis, anggaran merupakan managerial *plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategis. Begitu juga dalam organisasi sektor publik, anggaran menjadi rencana manajerial untuk menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik, yaitu penyediaan pelayanan publik yang prima.[32]

---

[30]*Ibid*. h. 17.

[31]*Ibid*.

[32]Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 22.

2. Karakteristik Anggaran

Anggaran sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:[33]

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah atau panjang.
c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

3. Manfaat Anggaran

Ada beberapa alasan penyebab anggaran dianggap penting, yaitu:[34]

a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

[33]*Ibid*. h. 52.
[34]*Ibid*. h. 53.

c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat, dalam hal ini anggaran berperan sebagai instrumen akuntabilitas publik.

4. Fungsi Anggaran

Abdul Halim mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut:[35]

a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Mardiasmo menyatakan bahwa anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan akan dibuat. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan, digunakan untuk:[36]

1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya.

[35]*Ibid*. h. 50.
[36]*Ibid.*

3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*missappropriation*), atau adanya penggunaan yang tidak semestinya (*misspending*). Anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu:[37]

1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
2) Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*).
3) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians.
4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

[37]*Ibid*. h. 51.

Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.[38]

d. Anggaran Sebagai Alat Politik

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Anggaran tidak sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan keterampilan berpolitik (*political skill*), membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai oleh para manajer publik. Oleh karena itu, kegagalan dalam melaksanakan anggaran akan dapat menjatuhkan kepemimpinan dan kredibilitas pemerintah.[39]

e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat

[38]*Ibid.*
[39]*Ibid.*

mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. Oleh karena itu, anggara dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.[40]

f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.[41]

g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.[42]

h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

---

[40]*Ibid.*
[41]*Ibid.*
[42]*Ibid*. h. 52.

Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya nonpemerintah, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencanakerja pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).[43]

5. Siklus Anggaran Sektor Publik

Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Menurut Mardiasmo siklus anggaran meliputi empat tahap, yaitu:[44]

a. Tahap Persiapan Anggaran *(Budget Preparation)*

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebihdahulu dilakukan penaksiran

[43]*Ibid.*
[44]Gita Pramudya Saraswati, *Op.Cit*. h. 24-25.

pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran *(budget ratification)*

Pada tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran *(budget implementation)*

Dalam tahap pelaksanaan anggaran ini, hal terpenting yang harus diperhatikan manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasiakuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai danhandal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemui banyak masalah.

6. Pendekatan Dalam Penyusunan Anggaran

Secara garis besar, pendekatan dalam penyusunan anggaran dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:[45]

a. *Top down approach* (bersifat dari atas ke bawah)

Dalam penyusunan anggaran ini, manajemen senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah sehingga pelaksana anggaran hanya melakukan apa saja yang telah disusun. Tapi pendekatan ini jarang berhasil karena mengarah kepada kurangnya komitmen dari sisi pembuat anggaran dan hal ini membahayakan keberhasilan rencana anggaran.

b. *Bottom up approach* (bersifat dari bawah ke atas)

Pada *bottom up approach*, anggaran sepenuhnya disusun oleh bawahan dan selanjutnya diserahkan atasan untuk mendapatkan pengesahan. Dalam pendekatan ini, manajer tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran. Pendekatan dari bawah ke atas dapat menciptakan komitmen untuk mencapai tujuan anggaran, tetapi apabila tidak dikendalikan dengan hati-hati dapat menghasilkan jumlah yang sangat mudah atau yang tidak sesuai dengan tujuan keseluruhan perusahaan.

c. Kombinasi *top down* dan *bottom up*

[45]Gita Pramudya Saraswati, *Loc.Cit*.

Kombinasi antara kedua pendekatan inilah yang paling efektif. Pendekatan ini menekankan perlunya interaksi antara atasan dan bawahan secara bersama sama menetapkan anggaran yang terbaik bagi perusahaan.

7. Pengertian Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dianggap sebagian orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi dari para anggota organisasi. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional,di mana para individual terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap paraindividu tersebut.[46]

Menurut Arfan dan Muhammad, Partisipasi adalah suatu "proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya."

Menurut Brownell dalam Eka Yuda partisipasi merupakan proses dimana individu-individu terlibat langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian target anggaran mereka.

[46]*Ibid*. h. 26

Jadi, partisipasi penyusunan anggaran adalah keterlibatan pihak–pihak secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan penyusunan anggaran.

8. Manfaat Partisipasi Penyusunan Anggaran

Manfaat dari partisipasi dalam penyusunan anggaran menurut Arfan Ikhsan dan Muhammad Ishak adalah:[47]

a. Partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen.
b. Partisipasi juga berarti meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang pada gilirannya cenderung meningkatkan kerja sama antar-anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Tujuan organisasi yang dibantu penetapannya oleh orang-orang tersebut, kemudian akan dipandang sebagai tujuan yang selaras dengan tujuan pribadi mereka.
c. Partisipasi berarti juga berkaitan dengan penurunan tekanan dan kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran. Hal ini disebabkan orang yang berpartisipasi dalam penetapan tujuan mengetahui bahwa tujuan tersebut wajar dan dapat dicapai.
d. Partisipasi juga dapat menurunkan ketidakadilan yang dipandang ada dalam alokasi sumber daya organisasi antara subunit organisasi, serta reaksi negatif yang dihasilkan dari persepsi semacam itu. Manajer yang terlibat dalam penetapan tujuan akan memiliki pemahaman yang lebih

[47]*Ibid*. h. 27-28.

baik mengenai penyebab sumber daya dialokasikan dengan cara demikian.

e. Melalui proses negosiasi dan banyak diskusi anggaran yang terjadi dalam rapat, manajer akan menyadari masalah dari rekan-rekannya di unit organisasi lainnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik atas saling ketergantungan antar-departemen. Dengan demikian, banyak masalah potensial yang berkaitan dengan anggaran dapat dihindari.

9. Pengukuran Partisipasi Penyusunan Anggaran

Pengukuran partisipasi dalam penyusunan anggaran diukur berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh Milani. Pengukuran bertujuan untuk menilai partisipasi manajer dalam berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan. Menurut Milani partisipasi manajer dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:[48]

a. Keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran.
b. Wewenang manajer dalam penyusunan anggaran dan berlakunya anggaran.
c. Keterlibatan manajer dalam pengawasan proses penyusunan anggaran.
d. Keterlibatan manajer dalam tujuan pelaksanaan anggaran pada bidang yang dipimpin.

Proses penyusunan anggaran akan menetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian sasaran

[48]*Ibid*. h. 20.

anggaran dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut untuk memungkinkan melaksanakan perannya. Peran tersebut menuntut manajer untuk bisa mengarahkan bawahan agar bekerja dengan maksimal guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

10. Indikator partisipasi penyusunan anggaran

Adapun indikator dari supriyono (2004) partisipasi anggaran adalah sebagai berikut:

a. Seberapa besar tingkat keterlibatan Kasubbag dan Kasi dalam penyusunan Anggaran dibidang yang menjadi tanggung jawabnya
b. Tingkat kelogisan alasan yang diberikan oleh atasan para Kasi dan Kasubbag dalam merevisi anggaran yang mereka usulkan
c. Seberapa sering Kasi dan Kasubbag mengajak atasannya mendiskusikan anggaran yang diusulkan
d. Kontribusi Kasi dan Kasubbag terhadap anggaran menjadi tanggung jawabnya.

B. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja SDM merupakan istilah yang berasal dari job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh karyawan).[49] Berikut ini beberapa definisi kinerja menurut pendapat para ahli sebagai berikut:

[49]A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. *Evaluasi Kinerja SDM*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 9.

Mangkunegara mendefinisikan kinerja sebagai "Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya". Sedangkan menurut Bambang dalam Mangkunegara mendefinisikan bahwa "Kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya perjam)".[50]

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan dari tugas yang diberikan. Kinerja karyawan terukur dan dapat dinilai oleh atasan sejauh mana mereka memberikan konstribusi untuk perusahaan.

2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja pegawainya. Secara umum tujuan dari penilaian kinerja asalah memberikan timbal balik kepada pegawai dalam upaya memperbaiki kerja pegawai dan untuk meningkatkan produktifitas organisasi. Secara khusus tujuan penilaian kinerja adalah sebagai pertimbangan keputusan organisasi terhadap pegawainya mengenai promosi, mutasi, kenaikan gaji, pendidikan dan pelatihan ataupun kebijakan menejerial lainnya. Sehingga penilaian

[50]*Ibid.*

kinerja dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses perekrutan, seleksi, penempatan dan pelatihan di organisasi.[51]

3. Aspek-aspek Penilaian Kinerja

Menurut Hassibuan dalam Mangkunegara mengemukakan bahwa aspek-aspek yang dinilai dalam kinerja adalah sebagai berikut:[52]

a. Kerjasama

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerjasama dengan karyawan lainnya secara vertikal dan horizontal di dalam maupun di luar pekerjaan akan semakin baik.

b. Tanggung Jawab

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, pekerja dari hasil kerjanya, sarana prasarana yang dipergunakan, serta prilaku kerjanya.

c. Kedisiplinan

Penilai menilai kedisiplinan karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya.

[51]*Ibid*. h. 10.
[52] *Ibid*. h. 17.

d. Sikap

Penilai menilai karyawan dari sikap prilaku, kesopanan, periang, disukai, memberi kesan menyenangkan, memperhatikan sikap yang baik, serta berpenampilan simpatik dan wajar.

e. Kreativitas

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdayaguna dan berhasilguna.

f. Kejujuran

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti bawahannya.

g. Inisiatif

Penilai menilai kekampuan berfikir yang orisinil dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis, memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapinya.

h. Hasil Kerja

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaan.

i. Kesetiaan

Penilai mengukur kesetiaan keryawan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

4. Aspek-aspek Standar Pekerjaan

Adapun aspek-aspek standar pekerjaan terdiri dari aspek kuantitatif dan kualitatif.[53]

a. Aspek kuantitatif meliputi:
   1) Proses kerja dan kondisi pekerjaan.
   2) Waktu yang dipergunakan atau lamanya menyelesaikan pekerjaan.
   3) Jumlah kesalahan dalam melakukan pekerjaan.
   4) Jumlah dan jenis pemberian dalam bekerja.

b. Aspek kualitatif meliputi:
   1) Kecepatan kerja dan kualitas pekerjaan.
   2) Tingkat kemampuan dalam bekerja.
   3) Kemampuan menganalisis data atau informasi.
   4) Kemampuan menggunakan mesin atau peralatan.
   5) Kemampuan mengevalusai (keluhan dan kebiasaan konsumen).

[53]*Ibid*. h. 18.

C. Partisipasi Penyusunan Anggaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Adapun nilai-nilai dasar Islam yang terkait dengan perencanaan dan realisasi anggaran adalah kejujuran (*shidq, amanah*), keadilan, pertanggungjawaban, kemanfaat dan kesejahteraan. Sedangkan integrasi nilai-nilai dasar Islam dalam anggaran, didasarkan kepada kaidah ushul fiqh yang menegaskan bahwa:

Artinya: "sesutau kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesutau hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula".[54]

Dalam Pengelolaan Anggaran, kejujuran (*shidq*) tersebut adalah suatu kewajiban, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip transparansi anggaran. Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut maka, melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Hal ini berarti, dalam pandangan islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan.

Penerapan *shidq* sangat berkaitan dengan *amanah*. Bila *amanah* kuat, maka berkembanglah *shidq*. Dalam hal ini *shidq* berkaitan dengan proses informasi anggaran atau akuntabilitas anggaran (pertanggungjelasan anggaran), sedangkan *amanah* berkaitan dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam rangka implementasi nilai-nilai kemanfaatan, kesejahteraan dan pertanggungjawaban.

---

[54]H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah –masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), h. 95-96.

Sedangkan untuk mengontrol *shidq* dan *amanah*, diperlukan sistem pengawasan. Sistem kontrol atau pengawasan ini harus dilakukan dengan sangat tegas. Ia harus didukung oleh *law enforcement* yang mencerminkan nilai-nilai keadilan atau kesetaraan.

Sehingga dengan mengacu kepada kaidah ushul fiqh di atas, dapat ditegaskan bahwa pengawasan anggaran adalah wajib karena, penerapan *shidq* dan *amanah*, tidak akan berjalan, tanpa adanya pengawasan. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran. Oleh karena itu dalam perspektif ekonomi Islam, menegakkan transparansi anggaran adalah kewajiban agama Islam yang mulia. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:[55]

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"(Q.S. An-Nisaa':58)

Dengan demikian, penerapan transparansi anggaran akan menciptakan efisiensi terutama dalam pendanaan. Sebaliknya jika terdapat kecurangan, karena dipesan oleh pihak tertentu untuk menaikkan angka yang tidak sesuai dengan plafonnya, maka yang terjadi bukan hanya pembengkakan dana, tetapi sangat dimungkinkan terdapat penyalahgunaan atau korupsi.

[55]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 69.

Dalam kerangka inilah integrasi nilai-nilai dasar Islam dalam penyusunan anggaran menjadi persoalan yang fundamental dalam upaya efisiensi dan antisipasi korupsi. Dalam konteks ini integrasi nilai-nilai dasar Islam dalam bentuk peraturan pengawasan perusahaan, urgensinya sangat kuat, karena tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi tetapi juga publik.[56]

Karena korelasi ini pula, para pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran sudah seharusnya dikaitkan secara hukum, sehingga punya konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan di muka pengadilan jika terjadi secara sengaja dalam pekerjaannya.

Penerapan nilai-nilai dasar Islam yang dikaitkan secara hukum tersebut, akan lebih jelas dari pada hanya dikaitkan secara moral atau etis yang tingkat ketaatannya sangat bergantung pada kesadaran pribadi yang bersangkutan. Karena sifat ketaatan yang bersifat subjektif tersebut menjadikan proporsi keterikatan relatif rendah.

D. Kinerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Manusia adalah makhluk Tuhan paling sempurna paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, dengan segala akal dan pikirannya, manusia harus berusaha mencari solusi hidup yaitu dengan bekerja keras mengaharapkan ridho Allah SWT. Dengan bekerja kita akan mendapatkan balasan yang akan kita terima, apabila seseorang memposisikan pekerjaannya dalam dua konteks, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka hal itu disebut rezeki dan berkah

[56]H.A. Djazuli, *Op.Cit*. h. 98.

serta hasil pekerjaan yang baik adalah yang dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah Saw.[57]

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl: 93

وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَلَتُسۡـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٩٣

Artinya : "Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan".

Menurut Mahsun, kinerja (*performance*) adalah gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi pengelolaan sumber daya (input) dalam menghasilkan barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sementara itu, kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[58]

[57]Rifki Prayoga Gunawan, "Analisis Pengaruh Upah Terhadap Kinerja Pegawai Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam". (Skripsi program Sarjana Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2016), h. 39.

[58]Mahsun, Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2006), h. 26.

Kinerja religius Islami adalah suatu pencapaian yang diperoleh seseorang atau organisasi dalam bekerja/berusaha yang mengikuti kaidah-kaidah agaman atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terdapat beberapa dimensi kinerja Islami meliputi:[59]

1. Amanah dalam bekerja yang terdiri atas: profesional, jujur, ibadah dan amal perbuatan.
2. Mendalami agama dan profesi terdiri atas: memahami tata nilai agama, dan tekun bekerja.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kegiatan/usaha yang telah ditetapkan. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 105 mempunyai beberapa unsur dalam melakukan penilaian kinerja suatu kegiatan/usaha yang meliputi:[60]

1. Performance (Kinerja)
2. Capability (Perwujudan dari bakat dan kemampuan)

Menurut Asyraf A. Rahman istilah "kerja" dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat

[59]*Ibid.*
[60]*Ibid.*

sekelilingnya serta negara.[61] Diantara hadits yang menjelaskan tentang kerja dalam Islam, sebagaimana berikut:

Dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-'Awwam r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Sungguh seandainya salah seorang diantara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik dari pada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak." (H.R. Bukhari)

Dalam hadits yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa bekerja merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Rasulullah Saw. memberikan pelajaran menarik tentang pentingnya bekerja. Dalam Islam bkerja bukan sekadar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya, bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia bahkan dikategorikan *jihad fii sabilillah*. Dengan demikian Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi mereka yang mau berusaha dengan sekuat tenaga dalam mencari nafkah (penghasilan). Sebagaimana riwayat:

"Rasulullah Saw. pernah ditanya, Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, Pekerjaan terbaik adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua bentuk jual beli yang dianggap baik."[62] (H.R. Ahmad dan Baihaqi)

[61]Asraf A. Rahman, *Evaluasi Kinerja SDM* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 117.

"Dari Miqdan r.a. dari Nabi Muhammad Saw., bersabda: Tidaklah makan seseorang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud a.s., makan dari hasil usahanya sendiri."[63](H.R. Bukhari)

Baginya tidak akan sama antara yang baik dan yang buruk atau antara yang halal dan haram, meskipun hal yang buruk itu menarik hati dan menggiurkan karena besarnya keuntungan materi yang didapat. Ia akan selalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, bahkan hanya berusaha mencari rizki sebatas yang dibolehkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dalam perspektif Islam telah memberikan rambu-rambu untuk mendapatkan sumber daya manusia yang profesional, sebagaimana telah diajarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

[62]Ihsan Kamil, *Shahih Bukhari Muslim, Edisi Ringkasan Hadits* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 56.

[63]*Ibid*.

Sedangkan kriteria sumber daya manusia dalam pandangan islam atau perspektif syariah, yaitu:[64]

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Faktor iman dan takwa merupakan fundamen kepibadian yang dapat menghasilkan pekerjaan yang bertanggung jawab.
2. Berbudi pekerti luhur. Iman sesorang pekerja akan memancarkan budi pekerti luhur termasuk di dalamnya tanggung jawab, lurus dan jujur, istiqomah sabar dan yang lainnya serta sikap dan sifat terpuji yang diaplikasikan ke dalam pekerjaan yang dijalaninya.
3. Sehat jasmani. Setiap pekerja muslim perlu membina fisiknya melalui berbagai upaya, antara lain memakan makanan yang halal, bergizi baik, olahraga, istirahat serta kerja yang seimbang.
4. Sehat rohani. Meliputi kestabilan mental dalam menghadapi tugas pekerjaan, memiliki semangan dan gairah kerja yang selalu hidup, antusias dan lain sebagainya.
5. Terampil. Salah satu ukuran mutlak untuk menentukan tenaga yang berkualitas adalah keterampilan (Skill) dalam bidang tugas yang dihadapinya. Betapa pentingnya skill yang dilandaskan dalam QS. Az-Zumar: 9

[64]Yusanto Ismail, *Pengantar Ekonomi Islam* (Penerbit Al-Azhar, 2009), h. 183.

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ
هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾

Artinya: "(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran".

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketidaksamaan antara orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak ingin mencari keingintahuannya, padahal orang yang mengetahui sesungguhnya orang yang dapat menerima pelajaran dan mampu mengintropeksi dirinya.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan Camat Kecamatan Baradatu, maka didapatkan data sebagai berikut:[65]

1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Baradatu

Kecamatan Baradatu dibentuk berdasarkan SK Gubernur KDH Tingkat 1 Lampung tanggal 10 Oktober 1972 No.G/02/38/D.1/HK/1972 dan diresmikan tanggal 1 Januari 1972 dengan pusat pemerintahan didesa Tiuh Balak Pasar yang merupakan pemecahan dari kecamatan Blambangan Umpu.

Sejarah panjang Baradatu di mulai sejak zaman kolonial Belanda, sejak kota ini mulai dihuni penduduk. Pada awalnya Baradatu berstatus Negeri (semacam desa pada masa lalu) yang berada di bawah kekuasaan Kawedanaan Blambangan Umpu. Negeri Baradatu membawahi kampung-kampung Gunung Labuhan, Tiuh Balak, Gunung Katun, Cugah, dan Banjar Masin (di tepi Way Besay, dalam Bahasa Lampung "Way" berarti "sungai" dan "Besay" berarti "Besar").

Penduduk Baradatu semakin bertambah dengan datangnya gelombang pendatang, utamanya dari tanah jawa. Pendatang yang bermukim di

---

[65]*Dokumentasi* Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, dicatat tanggal 05 Oktober 2017.

Baradatu ini sebagian besar merupakan transmigran. Terdapat dua pola transmigran yang mulai migrasi sejak tahun 1957-1958 ini.

Pola pertama, transmigrasi umum (TU) yang kebanyakan bermukim di kampung-kampung sebelah barat jalan Lintas Tengah Sumatera yang baru dibentuk kemudian. Kampung-kampung itu saat ini bernama Taman Asri, Campur Asri dan Mekar Asri. Penduduk pendatang ini banyak yang berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Bojonegoro termasuk Bandung dan Sumedang. Oleh penduduk pendatang, nama-nama kota asal ini masih digunakan sebagai penanda lokasi tempat tinggal mereka.

Pola kedua penduduk pendatang tergabung dalam Transmigrasi Veteran (Transvet) Tahun 1959 dan 1961. Transmigran pola ini bermukim di wilayah sebelah selatan jalan Lintas Tengah Sumatera. Saat ini mereka bermukim di Desa Bhakti Negara, Setia Negara dan Gedung Rejo. Transmigran ini Kebanyakan berasal dari Solo, Yogyakarta, Kedu, Madiun dan Kediri.

Penduduk asli Baradatu sendiri bersuku Lampung yang banyak mendiami kampung-kampung asli dalam kenegrian Baradatu di Desa Gunung Labuhan, Cugah, Tiuh Balak, maupun Banjar Masin. Yang menarik di daerah Baradatu, selain penduduk asli adalah keberadaan komunitas/kelompok suku yang mendiami suatu kawasan. Contohnya saja kawasan Gang Galih yang mayoritas penduduknya warga Padang. Warga perantauan ini mendiami pemukiman sepanjang Gang Galih.

2. Keadaan Geografis Kecamatan Baradatu

Kecamatan Baradatu merupakan salah satu kecamatan(dari empatbelas kecamatan) yang terletak di Kabupaten Way Kanan dengan luas wilayah administrasi pemerintahan 17.255 Km^2. Kecamatan Baradatu merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian ±187 M dari permukaan laut. Wilayah kecamatan Baradatu berbatasan langsung dengan:

a. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Kec. Blambangan Umpu
b. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kec. Gunung Labuhan
c. Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Kec. Gunung Labuhan Dan Banjit
d. Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Kec. Banjit Dan Blambangan Umpu

Secara Geografis Kecamatan Baradatu terdiri dari 3 kelurahan dan 19 Kampung, Luas Kecamatan Baradatu berdasarkan Kampung dan Kelurahan terdapat pada table berikut:

Tabel 3.1
Data Luas Wilayah Kecamatan Baradatu

No	Kelurahan/Kampung	Luas Wilayah
1	Taman Asri	325
2	Tiuh Balak Pasar	2.126
3	Campur Asri	345
4	Setia Negara	820
5	Gedung Pakuon	1.000
6	Bumi Merapi	249
7	Banjar Sari	225
8	Gunung Katun	2.010
9	Bhakti Negara	575
10	Bumi Rejo	250
11	Suko Sari	400
12	Banjar Setia	850
13	Gedung Rejo	800
14	Banjar Agung	1.000
15	Cugah	1.460
16	Tiuh Balak 1	345
17	Tiuh Balak	1.134
18	Mekar Asri	406
19	Banjar Negara	1.050
20	Banjar Masin	1.200
21	Banjar Mulya	600
22	Banjar Baru	230
	Total Luas Kecamatan Baradatu	17.255

Sumber: Profil Kecamatan Baradatu 2017

Luas wilayah Kecamatan Baradatu secara keseluruhan adalah 17.255 Km^2, terdiri dari lahan sawah 8.575 Ha, pekarangan 978 Ha, perladangan 5.350 Ha, perkebunan 2.351 Ha dan lahan kolam, tambak serta rawa seluas 1 Ha.

3. Kondisi Demografis Kecamatan Baradatu

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan Kasi Tata Pemerintahan, Maka didapatkan data sebagai berikut:[66]

a. Komposisi penduduk berdasarkan kelamin

Jumlah penduduk di Kecamatan Baradatu sebanyak 50.746 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 14.154 KK. Rincian penduduk Kecamatan Baradatu menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Total	%
Laki-Laki	25.548	50,34
Perempuan	25.198	49,65
Jumlah	50.746	100

Sumber: Profil Kecamatan Baradatu, 2017

b. Komposisi penduduk menurut agama

Untuk melihat komposisi penduduk Kecamatan Baradatu menurut agamanya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Komposisi Penduduk Menurut Agama

Agama	Total	%
Islam	48.535	95,6
Katolik	1.170	2,3
Kristen Protestan	825	1,6
Hindu	52	0,1
Kepercayaan	164	0,3
Jumlah	50.746	100

Sumber: Profil Kecamatan Baradatu, 2017

[66]*Dokumentasi* Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, dicatat tanggal 05 Oktober 2017

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penduduk Kecamatan Baradatu mayoritas beragama Islam dengan persentase 95,6%, Katolik 2,3%, Kristen Protestan 1,6%, Hindu 0,1%, dan Kepercayaan 0,3%. Meskipun hidup dalam keberagaman agama, namun mereka tetap menjunjung tinggi solidaritas dengan cara saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.

c. Komposisi penduduk menurut pendidikan

Untuk melihat komposisi penduduk Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan menurut tingkat pendidikannya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
Tidak/Belum Sekolah	11.674	23
Belum Tamat SD	6.299	12,41
Tamat SD/sederajat	14.330	28,24
SMP/Sederajat	7.880	15,53
SMA/Sederajat	8.442	16,64
D-I/D II	488	0,96
D-III	481	0,95
S-I	1.100	2,16
S-II	52	0,10
Jumlah	50.746	100

Sumber: Profil Kecamatan Baradatu 2017

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa pada tahun 2017 masyarakat Kecamatan Baradatu mayoritas tamatan SD dengan persentase 28,24%, Dan hanya 2,26% yang melanjutkan pendidikan sampai tingkat sarjana.

4. Visi Dan Misi Kecamatan Baradatu

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Maju : Menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Way Kanan yang tinggi.

Berdaya Saing : Menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan potensi daerah.

b. Misi

1) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
2) Meningkatkan Kwalitas dan Pelayanan Pendidikan
3) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Industri Perdagangan dan Pariwisata.
5) Membentuk SDM yang terampil, handal dan dapat berdaya saing sehingga terbentuk Pemerintahan yang bersih dan berwibawa**.**

B. Gambaran Penyusunan Anggaran Di Kantor Kecamatan Baradatu

Penyusunan program kerja dan kegiatan kecamatan sebagai dasar dalam menyusun anggaran mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang merupakan penjabaran dari kewenangan atributif (Pasal 126 UU Nomor 32 Tahun 2004) dan

kewenangan delegatif yang diberikan oleh Kepala Daerah. Penyusunan anggaran kecamatan mekanismenya adalah sebagai berikut : [67]

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) tentang Permintaan anggaran dari satuan kerja pemerintah daerah, selanjutnya Camat menyusun RKA SKPD Kecamatan Baradatu.
2. SE KDH berisi tentang jumlah atau pagu anggaran sementara, petunjuk teknis (juknis) pengisian RKA SKPD dan lampiran Keputusan Kepala Daerah tentang Harga Satuan Barang dan Jasa.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Daerah adalah "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".Secara garis besar, siklus pengelolaan keuangan kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan, pada siklus ini berisi :
    a. Pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kecamatan.
    b. Penyusunan Renstra Kecamatan (periode 5 tahunan).
    c. Penyusunan Renja Kecamatan (periode 1 tahunan).

[67]*Modul Pengelolaan Keuangan* Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, dicatat tanggal 06Oktober 2017.

2. Penganggaran, pada siklus ini berisi penyusunan Anggaran Kecamatan yang terdiri dari :

   a. Pendapatan Kecamatan

      Pendapatan kecamatan adalah semua unsur pendapatan asli daerah yang *pemungutannya didelegasikan kepada Camat.*

   b. Belanja Kecamatan

      Belanja kecamatan terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja tidak langsung adalah belanja (pengeluaran) yang tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya program/kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari :

      1) Belanja pegawai
      2) Belanja bunga
      3) Belanja subsidi
      4) Belanja hibah
      5) Belanja bantuan sosial
      6) Belanja bagi hasil
      7) Belanja bantuan keuangan
      8) Belanja tidak terduga

      Belanja langsung adalah belanja (pengeluaran) yang dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

      1) Belanja pegawai
      2) Belanja barang dan jasa

3) Belanja modal

c. Pembiayaan Kecamatan

Pembiayaan adalah selisih antara pendapatan dengan belanja.

Pendapatan > Belanja = surplus ~> dipakai untuk apa

Pendapatan < Belanja = devisit ~< ditutup dari mana

Untuk anggaran kecamatan tidak disarankan ada defisit, kecuali untuk pengeluaran mendesak atau darurat seperti penanggulangan bencana alam, wabah penyakit dsb.

3. Penatausahaan Keuangan Kecamatan

a. Penatausahaan Penerimaan

Bendahara Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan.

b. Penatausahaan Pengeluaran

Bendahara Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

4. Pelaporan

Setelah berakhirnya tahun anggaran, Camat wajib menyusun pelaporan pelaksanaan anggaran yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

   Setelah berakhirnya tahun anggaran, Camat wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

6. Evaluasi

   Evaluasi dilakukan oleh Kepala Daerah untuk melihat sejauhmana perkembangan antara perencanaan dan pencapaian.

C. Gambaran Umum Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Baradatu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor kecamatan Baradatu diperoleh gambaran tentang kinerja para pegawai yang dinilai oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:[68]

Tabel 3.5
Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

No	NamaPegawai	Jabatan	Nilai		Predikat
			2015	2016	
1	Arie Anthony Thamrin, S.STP.,M.IP	Camat	88,02	88,42	Baik
2	Desta Budi Rahayu.N, S.STP.	Sekcam	87,37	87,39	Baik
3	Sugiono	Kasi Trantib	88,01	88,07	Baik
4	Suprapti	Kasi PM	88,02	88,05	Baik
5	Mukhlis	Kasi Kesrak	87,53	87,82	Baik
6	Agus Salim	Kasi Tata Pemerintahan	88,65	88,78	Baik
7	Mirwansyah, S.E.,M.M.	Kasi Pelayanan	83,25	88,78	Baik
8	Ratu Mas Anita, S.Pd.I.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	79,49	83,26	Baik
9	Sri Harjanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	83,57	80,19	Baik
10	Yeniche	Staf Perencanaan & Keuangan	79,33	79,406	Baik

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

[68]*Penilaian Prestasi Kerja PNS* Kantor Camat Baradatu Kabupaten Way Kanan Dicatat Tanggal 09 Oktober 2017.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja para pegawai negeri sipil pada kantor kecamatan Baradatu kabupaten Way Kanan dapat dikatakan baik. Hal ini sesuai dengan hasil yang menunjukkan bahwa semua pegawai berpredikat baik termasuk pegawai bagian penyusunan anggaran, sesaui dengan penilaian yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah setempat.

Penilaian kinerja merupakan proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu pegawai. Dalam kinerja dinilai kontribusi pegawai kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Umpan balik kinerja memungkinkan pegawai mengetahui seberapa baik mereka bekerja apabila dibandingkan dengan standar organisasi. Di dalam organisasi modern penilaian kinerja merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar kinerja menjadi basis bagi keputusan-keputusan yang memperngaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer dan kondisi kepegawaian lainnya.

Bekerja haruslah sesuai dengan keahliannya. Hal ini sangat penting karena untuk memaksimalkan hasil yang baik dari pekerjaannya. Mengingat sangat pentingnya proses peningkatan kinerja pegawai bagi perusahaan, maka diharapkan dengan adanya proses peningkatan kerja pegawai yang efektif berdampak bagi perkembangan kantor camat baradatu untuk kedepannya guna memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas.

D. Gambaran Distribusi Jawaban Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan untuk hasil dari kuesioner yang telah tersedia yang kemudian disebarkan dan ditarik kembali peneliti, dikoreksi dengan baik apakah semua responden mengembalikan dan mengisi kuesioner tersebut sesuai dengasn item masing-masing dan alternatif yang dipilih menjadi menjawab, sehingga yang diperoleh dapat dikoreksi dan diuji kebenarannya. Berikut adalah distribusi jawaban responden per item indikator dari kuesioner yang telah disebarkan kepada 10 responden.

Sebelum masing-masing item pertanyaan dianalisis, terlebih dahulu penulis sajikan dan klasifikasikan jawaban kuesioner dalam bentuk tabel, dan selanjutnya dihitung presentasenya dengan menggunakan rumus: jumlah menjawab x 100/ jumlah sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto "dijumlah dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan doperoleh presentase".[69]

Penulis akan menyampaikan pengolahan data hasil distribusi jawaban responden berdasarkan pertanyaan kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

[69]Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), h. 35

Tabel 3.6
Tabel Tabulasi Responden

No	Pertanyaan	Jawaban Responden		Jumlah
		Ya	Tidak	
Variabel X (Partisipasi Penyusunan Anggaran)				
1	Apakah anda selalu terlibat dalam penyusunan anggaran?	2	8	10
2	Apakah anda selalu mendengarkan alasan atasan yang logis dalam merevisi anggaran?	5	5	10
3	Apakah dalam setiap penyusunan anggaran anda selalu melibatkan atasan anda untuk berdiskusi?	4	6	10
4	Apakah usulan atau pemikiran anda berpengaruh terhadap anggaran akhir?	3	7	10
5	Apakah anda selalu memprakarsai dalam penyusunan anggaran?	4	6	10
Variabel Y (Kinerja Pegawai)				
1	Apakah anda selalu hadir tepat waktu?	10	0	10
2	Apakah anda selalu bekerja sama dengan semua pegawai?	8	2	10
3	Apakah anda mampu menyelesaikan setiap pekerjaan?	8	2	10
4	Apakah anda mampu mengambil inisiatif dalam bekerja?	6	4	10

Sumber: Data Primer Diolah Pada 2017

Berdasarkan tabel 3.6 di atas jawaban responden terhadap partisipasi penyusunan anggaran (Variabel X) yang tertinggi menjawab Tidak adalah pada pertanyaan apakah anda selalu terlibat dalam penyusunan anggaran, yaitu dengan jumlah 8 responden menjawab Tidak. Dapat disimpulkan dari jawaban responden di atas, sebanyak 80% dari jumlah responden tidak berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap kinerja pegawai (Variabel Y) yang tertinggi menjawab Ya adalah pada pertanyaan

apakah anda selalu hadir tepat waktu yaitu dengan jumlah 10 responden menjawab Ya. Dapat disimpulkan dari jawaban responden di atas, sebanyak 100% dari jumlah responden atau seluruh responden sangat baik dalam bekerja dengan hadir selalu tepat waktu.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Baradatu

Anggaran merupakan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadappenyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka.

Penyusunan program kerja dan kegiatan kecamatan sebagai dasar dalam menyusun anggaran mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang merupakan penjabaran dari kewenangan atributif (Pasal 126 UU Nomor 32 Tahun 2004) dan kewenangan delegatif yang diberikan oleh Kepala Daerah. Tugas pokok dan fungsi unit kerja merupakan dasar dalam penyusunan anggaran unit kerja perangkat daerah.

Sumber utama anggaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berasal dari APBD kabupaten/kota. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut, maka anggaran kecamatan disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja

(Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) dan anggaran berdasarkan prestasi kerja (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dan diperlakukan sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan oleh masing-masing daerah mengalami peralihan. Kondisi obyektif perlakuan kecamatan khususnya anggaran kecamatan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta beban kerja kecamatan, tetapi masih menggunakan pendekatan pragmatis dan praktis dalam menentukan kriteria dan besaran alokasi anggaran sehingga cenderung dibuat seragam.

Sebelum anggaran disiapkan, organisasi seharusnya mengembangkan suatu rencana strategis. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, umumnya mencakup setidaknya untuk lima tahun ke depan. Organisasi dapat menerjemahkan strategi umum ke dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya kondisi perusahaan. Tanpa anggaran, dalam jangka pendek perusahaan akan berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali.

Tujuan-tujuan ini membentuk dasar anggaran. Anggaran memiliki hubungan yang erat dengan rencana strategis, yaitu membantu manajemen untuk memastikan bahwa semua perhatian tidak terfokus pada operasional jangka pendek. Hal ini penting karena anggaran, sebagai rencana satu periode, memiliki sifat untuk jangka pendek.

Di kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, sistem penyusunan anggaran sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat Kabupaten Way Kanan. Sehingga pegawai yang ada di Kantor Camat hanya menjalankan anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan. Pegawai yang ada di kantor Kecamatan Baradatu hanya sebatas menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) setiap tahunnya. Berikut ini peniliti akan menguraikan hasil temuan lapangan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai berdasarkan pengukuran pada indikator tiap variabelpartisipasi penyusunan anggaran (X) dan variabel kinerja pegawai (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Jawaban Responden Variabel X
(Partisipasi Penyusunan Anggaran)

No	Indikator	Jawaban Responden				Jumlah	
		Ya		Tidak			
		N	%	N	%	N	%
1	Seberapa besar tingkat keterlibatan para KASI dan KASUBBAG dalam pengusulan dan penyusunan anggaran dibidang yang menjadi tanggung jawabnya	2	20	8	80	10	100
2	Tingkat kelogisan alasan yang diberikan oleh atasan para KASI dan KASUBBAG dalam merevisi anggaran yang mereka usulkan	5	50	5	50	10	100
3	Seberapa sering KASI dan KASUBBAG mengajak atasannya mendiskusikan anggaran yang diusulkan	3	30	7	70	10	100
4	Kontribusi KASI dan KASUBBAG terhadap anggaran yang menjadi tanggungjawabnya	4	40	6	60	10	100

Sumber: Data primer diolah pada tahun 2017

Dari tabel di atas pertanyaan tentang partisipasi penyusunan anggaran dapat terlihat bahwa keikutsertaan atau partisipasi para pegawaidi kantor Kecamatan Baradatu dapat dikategorikan sangat kecil, karena terbukti dengan mayoritas jawaban responden menyatakan bahwa mereka memiliki tingkat kelogisan alasan yang diberikan oleh atasan para Kasi dan Kasubbag dalam merevisi anggaran yang mereka usulkan di kantor kecamatan baradatu dapat dikatakan besardengan presentase 50% responden menjawab Ya. Dan diikuti oleh indikator kontribusi Kasi dan Kasubbag terhadap anggaran yang menjadi tanggungjawabnya, seberapa sering Kasi dan Kasubbag mengajak atasannya mendiskusikan anggaran yang diusulkan dan seberapa besar tingkat keterlibatan para Kasi dan Kasubbag dalam pengusulan dan penyusunan anggaran dibidang yang menjadi tanggungjawabnya dengan presentase 40%, 30% dan 20% responden menjawab Ya. Dapat disimpulkan bahwa hanya 20% pegawai yang terlibat dalam penyusunan dan pengusulan anggaran dan 80% lainnya tidak terlibat dalam penyusunan anggaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu responden sebagai berikut:

Arie Anthony Thamrin (Camat) mengatakan "partisipasi atau keterlibatan para pegawai dalam menyusun anggaran sangat sedikit karena penyusunan anggaran dikantor kecamatan baradatu sudah ditetapkan dari kabupaten waykanan. Para pegawai hanya sebatas melaksanakan tugas yang ada di kasi masing-masing sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing kasi"[70]

[70]Arie Anthony Thamrin, wawancara dengan penulis, Way Kanan, 05 Oktober 2017.

Jadi dari data di atas dapat terlihat bahwa Keterlibatan para pegawai dalam menyusun anggaran tidak mempengaruhi kinerja. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuisioner variabel kinerja pegawai pada tabel 3.6 yaitu: penulis menyimpulkan bahwa dari pertanyaan ke-1 (apakah anda selalu hadir tepat waktu) sebanyak 10 responden (100%) menjawab Ya. Pertanyaan ke-2 (apakah anda selalu bekerja sama dengan semua pegawai) sebanyak 8 responden (80%) menjawab Ya, dan 2 responden (20%) menjawab Tidak. Pertanyaan ke-3 (apakah anda mampu menyelesaikan setiap pekerjaan) sebanyak 8 responden (80%) menjawab Ya, dan 2 responden (20%) menjawab Tidak. Pertanyaan ke-4 (apakah anda mampu mengambil inisiatif dalam bekerja) sebanyak 6 responden (60%) menjawab Ya, dan 4 responden (40%) menjawab Tidak. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran kantor Kecamatan Baradatu sangatlah sedikit.

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja pegawai dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Dari teori menurut Abdul Halim, dapat disimpulkan jika partisipasi penyusunan anggaran di kantor Kecamatan Baradatu tidak mempengaruhi kinerja. Hal ini dikarenakan anggaran sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan. Para pegawai biasanya hanya sebatas melaksanakan tugas serta memberikan laporan dan evaluasi pada satu periode

untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah. Sehingga, keikutsertaan pegawai dalam menyusun anggaran hanya pada proses pelaporan dan evaluasi saja.

Semakin seringnya bahawan dalam instansi pemerintahan yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran, tidak selalu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Sebaliknya semakin jarangnya bahawan yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, tidak selalu menunjukkan kinerja yang lebih buruk. Kondisi ini terjadi karena seringnya keikutsertaan bawahan dalam penyusunan anggaran, banyak pegawai yang menyatakan rata-rata bahwa pencapaian target kinerja dari tiap-tiap kegiatan yang dihasikan suatu program.

Sebaliknya ketika banyak pegawai yang sering menyatakan pendapat dan atau usulan mengenai anggaran, sebagian besar justru menyatakan rata-rata bahwa realisasi anggaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Banyaknya pegawai yang merasa rela memberikan pendapat dalam penyusunan anggaran, sebagian besar justru berpendapat bahwa hasil yang rata-rata dari dampak kegiatan terhadap kehiduapan masyarakat.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh positif Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pegawai. Semakin tinggi keterlibatan Kasubbag dan Kasi dalam Partisipasi Penyusunan Anggaran maka akan meningkatkan Kinerja dari Kasubbag dan Kasi tersebut. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan para Kasi dan Kasubbag dalam suatu organisasi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan adanya partisipasi tersebut akan mendorong para Kasi dan

Kasubbag untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang diembannya sehingga para Kasubbag dan Kasi akan meningkatkan kinerjanya agar mereka dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Kinerja pegawai. Jadi keterlibatan Kasi dan Kasubbag dalam penyusunan anggaran dapat berpengaruh positif dengan meningkatnya Kinerja pegawai.

Partisipasi Penyusunan Anggaran mempunyai peran yang cukup besar dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Kinerja Pegawai. Berdasarkan data yang diperoleh, skor jawaban responden pada Partisipasi Penyusunan Anggaran paling rendah dalam hal pengaruh responden tercermin dalam anggaran final/akhir yaitu sebesar 20% responden yang menjawab Ya. Hal tersebut mengindikasikan adanya partisipasi semu (*pseudoparticipation*) yang disebabkan karena organisasi tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan partisipasi. Kasubbag dan Kasi menyatakan persetujuan terhadap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Kabupaten Way Kanan.

B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Baradatu

Bekerja adalah suatu bentuk ibadah yang dilakukan di dunia. Bekerja dengan etika kerja yang benar sesuai ajaran islam merupakan syarat mutlak untuk dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebab dengan manajemen yang baik dapat meningkatkan semangat kerja yang berpengaruh dalam

meningkatkan produktivitas. Hal ini dikarenakan nilai etik, moral, susila atau akhlaq adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh sperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang islam hanya ada dua yaitu Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah Saw. Bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani, *"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat waktu, terarah, jelas dan tuntas)*. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Swt. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, cepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Kinerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja

mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara.

Kinerja Islam adalah suatu pencapaian yang diperoleh seseorang atau organisasi dalam bekerja/berusaha yang mengikuti kaidah-kaidah agama atau prinsip-prinsip ekonomi Islam.Islam telah mengatur bahwa setiap orang mampu berkinerja dengan baik, tapi kinerja yang baik bukan hanya menjalankan dengan baik saja tetapi dalam pandangan Islam harus sesuai kaidah-kaidah Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kinerja dalam pandangan ekonomi islam harus mengharapkan ridha Allah agar rezeki menjadi imbalan dan berkah dan Allah tidak suka hambanya bekerja dengan cara bathil seperti yang dijelakan Qur'an Surat An-Nisa ayat29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dari hasil penilitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pegawai dikantor kecamatan Baradatu sudah bekerja sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam dan kaidah islam.Hal ini terbukti dengan adanya penerapan etos kerja berdasarkan QS. At-Taubah ayat 105 yaitu bekerja halal, berusaha dan bekerja keras. Bekerja halal disini maksudnya adalah agar seseorang menjadi mandiri dan tidak

menggantungkan diri pada orang lain, sedangkan berusaha dan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan akhirat.

Berdasarkan data kuesioner dari tabel 3.6 di atas, penulis dapat memberikan gambaran bahwa kinerja pegawai Kantor Kecamatan Baradatu dari indikator kinerja pegawai yang sesuai dengan kaidah Islam bahwa pegawai Kantor Kecamatan Baradatu sudah memiliki kinerja yang baik dalam penyusunan anggaran yang sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam. Hal ini terbukti bahwa pegawai di kantor kecamatan Baradatu sudah menerapkan prinsip-prinsip kerja seperti bekerja keras, bekerja halal, berusaha, jujur, amanah, tanggung jawab, sabar, bersikap ramah dalam melayani masyarakat, memudahkan pelayanan kepada masyarakat serta selalu melakuan evaluasi kinerja setiap harinya maupun setiap bulannya.

Mengapa harus bekinerja dengan pandangan Islam? Supaya kinerja yang dimiliki pegawai Kantor Kecamatan Baradatu maksimal yakni dengan nilai islam, jujur, disiplin kerja keras, menghargai karya (kinerja), menghargai waktu, memiliki motivasi prestasi tinggi, kreatif, inovatif, kecerdasan emosi baik dengan kepribadian dewasa mental berdasarkan pandangan agama dan secara organisasi. Rasulullah bersabda:

"*sesungguhnya Allah sangat senang jika salah seorang di antara kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan tekun dan sangat bersungguh-sunggu."* (HR Muslim).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian mengenai Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada pegawai Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini berarti sering tidaknya berpartisipasi dalam penyusunan anggaran tidak mempengaruhi baik buruknya kinerja pegawai. Hal ini dikarenakan penyusunan anggaran di kantor kecamatan Baradatu sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu Kabupaten Way Kanan.
2. Kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Baradatu sudah sesuai dengan kaidah Islam dan perspektif Ekonomi Islam. Etos kerja berdasarkan QS. At-Taubah: 105 yaitu bekerja Halal, berusaha dan kerja keras.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang lebih kompleks sehingga dapat

lebih optimal dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan khususnya tentang partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai.

2. Untuk pegawai, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan partisipasi dan kinerja atau prestasi para pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman, Asraf. *Evaluasi Kinerja SDM*. Salemba Empat, Jakarta. 2012.

Agusti, Restu. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi Oleh Variabel Desentralisasi Dan Budaya Organisasi. Jurnal Ekonomi.* Vol. 20 No. 3 September 2012.

Arikunto, Suharsimi. Metodologi Penelitian. Bina Aksara, Yogyakarta. 2006.

As'ad, Moh. *Psikologi Industri Edisi ke Empat*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 1991.

Caesar Arif Budiman, Ria Nelly Sari, Vince Ratnawati. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Sorot.* Vol. 9 No. 1 April 2011.

Cholid Narbuko Dan Abu Achmad. *Metode Penelitian.* Bumi Aksara, Jakarta. 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV Penerbit Diponegoro, Bandung. 2006.

Dokumentasi Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Dicatat tanggal 05 Oktober 2017.

Esha Dening Shhandi, Handoko A Hasthoro, Wika H Putri. *Kinerja Manajerial Dalam Perspektif Islam. Universitas Janabadra, Yogyakarta.* Vol. 9 No. 1. Maret 2016.

Gunawan, Rifki Prayoga. *Analisis Pengaruh Upah Terhadap Kinerja Pegawai Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi program Sarjana Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung. 2016.

H. A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah –masalah Yang Praktis*. Kencana Perdana Media Group, Jakarta. 2006.

Halim, Abdul. Muhammad Syam Kusufi. *Teori, Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat, Jakarta. 2012.

Ibrahim, Ahmad Abu Sinn. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ismail, Yusanto. *Pengantar Ekonomi Islam.* Penerbit Al-Azhar. 2009.

Kamil, Ihsan. *Shahih Bukhari Muslim, Edisi Ringkasan Hadits.* Salemba Empat, Jakarta. 2012.

Lilis Setyowati, Purwantoro. *Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dan Kepuasan Kerja Pada Pemerintahan Kota Semarang. Media Ekonomi dan Teknologi Informasi.* Vol. 21. No. 2. September 2013.

M. Nafarin. *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat, Jakarta. 2009.

Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta. 2006.

Manan, Abdul. *Membangun Islam Kaffah*. Madina Pustaka, Jakarta. 2000.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. *Evaluasi Kinerja SDM*. PT. Refika Aditama, Bandung. 2012).

Mardalis. *Suatu Pendekatan Proposal, cetakan ke X.* Bumi Aksara, Jakarta. 2008.

Minta, Poerwadar. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 1976.

Moersalah, Musanef. *Pedoman Membuat Skripsi*. Gunung Agung, Jakarta. 1981.

Modul Pengelolaan Keuangan Kantor Camat Baradatu Kabupaten Way Kanan. Dicatat tanggal 06 Oktober 2017.

Muhadjir, Noer. *Metodologi Keilmuwan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Rake Sarasin, Yogyakarta. 2004.

Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, Gede Putu AGUS Susila Jana. *Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap*

Belanja Langsung Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Bisnis dan Manajemen.* Vol. 3. 2015.

Nurdiawan, Deddi. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta. 2007.

Pabundu, Muhammad Tika. *Metode Penelitian Riset Bisnis*. Bumi Aksara, Jakarta. 2006.

Penilaian Prestasi Kerja PNS Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Dicatat tanggal 09 Oktober 2017.

Saraswati, Gita Pramudya. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung. 2009.

-------. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung. 2014.

Suharwadi, Lubis K. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika, Jakarta. 2004.

Supriadi, Dedi. *Ekonomi Mikro Islam.* Pustaka Setia, Bandung. 2013.

Surachmad, Winarmo. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito, Bandung. 1985.

Thamrin, Arie Anthony. *Wawancara dengan penulis*. Way Kanan. 05 Oktober 2017

Wicaksono, Galih. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Sekolah Menengah Atas Di Tegal*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 6 No. 2. Oktober 2016.

LAMPIRAN